



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 59 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 15 Tahun 2024 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa, perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 15 Tahun 2024 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 725);



11. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 23);
12. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 15 Tahun 2024 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 15 Tahun 2024 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 Nomor 15) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

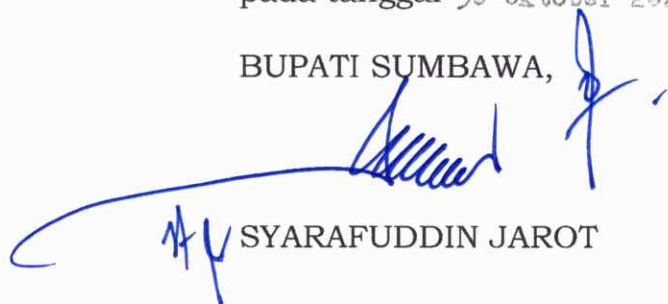
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 30 Oktober 2025

BUPATI SUMBAWA,



SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR 59

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 59 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUMBAWA NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA.

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA

**HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA KEPALA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

1. Nama Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Kode Jabatan :
3. Unit Kerja : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. JPT Utama :
 - b. JPT Madya :
 - c. JPT Pratama : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
 - d. Administrator :
 - e. Pengawas :
 - f. Pelaksana :
 - g. Jabatan Fungsional :
4. Ikhtisar Jabatan:
Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
5. Kualifikasi Jabatan :
 - a. Pendidikan : S2/S1 Sospol/MSDM/bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
 - b. Kursus/Diklat
 - 1) Penjenjangan : Diklatpim Tingkat II
 - 2) Teknis :
 - a. Diklat Administrasi dan Manajemen.
 - b. Diklat Manajemen Strategik.
 - c. Diklat Pengelolaan barang.
 - d. Diklat Perencanaan dan Pengawasan.
 - e. Diklat Kehumasan.
 - f. Diklat Teknis Bidang pengendalian penduduk, advokasi, dan pergerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, kesetaraan

gender dan peningkatan kualitas keluarga serta perlindungan perempuan dan anak.

g. Diklat Pengelolaan Proyek.

c. Pengalaman kerja :

1. Pernah menjadi pejabat tinggi pratama Lingkup Dinas/Badan/Sekretariat pada Pemerintah Kab. Sumbawa sekurang-kurangnya 2 tahun.
2. Pernah menjadi pejabat administrator Lingkup Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sekurang-kurangnya 4 tahun

6. Tugas Pokok :

Nama Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN	WAKTU KERJA EFEKTIF	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menyusun perencanaan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dokumen	3.000	75.000	4	0,160	
2	Memvalidasi bahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dokumen	3.000	75.000	4	0,160	
3	Mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kegiatan	3.000	75.000	4	0,160	
4	Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kegiatan	3.000	75.000	4	0,160	
5	Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kegiatan	1.200	75.000	4	0,064	
6	Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas	Kegiatan	6.000	75.000	3	0,240	
7	Melaksanakan administrasi/penatausahaan Dinas	Kegiatan	9.000	75.000	1	0,120	
8	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Kegiatan	9.000	75.000	1	0,120	
JUMLAH						1,184	
PEMBULATAN						1	

7. Bahan Kerja :

No	Bahan Kerja	Penggunaan Dalam Tugas
1.	ATK pakai habis	Bahan penunjang kegiatan
2.	Disposisi atasan	Dasar untuk melaksanakan kegiatan
3.	Surat/Naskah Dinas	Dasar untuk melaksanakan kegiatan
4.	Telaahan staf	Bahan pertimbangan atasan
5.	Data tentang penyelenggaraan kesekretariatan Dinas	Dokumen untuk melaksanakan kegiatan
6.	Data tentang penyelenggaraan kegiatan bidang teknis lingkup dinas	Dokumen untuk melaksanakan kegiatan
7.	Materi Peraturan Perundang-undangan	Landasan hukum melaksanakan kegiatan dan penyelesaian masalah
8.	Materi Keputusan Menteri	Pedoman teknis pelaksanaan kegiatan
9.	Materi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa	Landasan hukum melaksanakan kegiatan dan penyelesaian masalah
10.	Materi Peraturan Bupati Sumbawa	Landasan hukum melaksanakan kegiatan dan penyelesaian masalah
11.	Materi Keputusan Bupati Sumbawa	Pedoman teknis pelaksanaan kegiatan

8. Peralatan Kerja:

No	Peralatan Kerja	Digunakan Untuk Tugas
1.	Laptop dan perangkatnya	Alat input hasil kerja
2.	Koneksi internet	Alat unduh informasi/data/referensi/peraturan perundangan yang relevan
3.	Kendaraan dinas	Alat pendukung kelancaran pelaksanaan tugas
4.	Peraturan perundang-undangan	Acuan dan dasar pelaksanaan program kegiatan
5.	ATK	Alat untuk menulis, memeriksa dan mengoreksi
6.	SOTK Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pedoman penyelenggaraan dan membagi tugas kepada bawahan
7.	Visi, misi dan RPJMD	Penyusunan rencana program dan kegiatan unit kerja
8.	Dokumen penetapan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pedoman pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan

9. Hasil Kerja:

No	Hasil Kerja	Satuan Hasil
1.	Rencana kerja bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dokumen Rencana Kerja
2.	Bahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang valid	Frekuensi Kegiatan
3.	Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang terkoordinasi	Frekuensi Kegiatan
4.	Terlaksananya urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Frekuensi Kegiatan
5.	Evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Laporan
6.	Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas	Frekuensi Kegiatan
7.	Terlaksananya administrasi/penatausahaan Dinas	Kegiatan
8.	Laporan	Dokumen Kinerja

10. Tanggung Jawab:

- Kebenaran rencana kerja bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Kebenaran bahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Kebenaran pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang terkoordinasi
Terlaksananya urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Kebenaran pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Kebenaran evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Kebenaran pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas
- Kebenaran pelaksanaan administrasi/penatausahaan Dinas
- Kebenaran Laporan.

11. Wewenang :

- Memberi tugas
- Meminta hasil kerja bawahan
- Menyetujui/menolak laporan bawahan

- d. Menilai bawahan
- e. Memberi teguran kepada bawahan
- f. Meminta petunjuk atasan
- g. Memberi/tidak memberi data kepada pihak lain
- h. Menandatangani dokumen sesuai kewenangan

12. Hubungan Kerja:

1.	Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah	Atasan langsung	Menerima tugas, petunjuk kerja dan melaporkan hasil kerja
2.	Para Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah	Pejabat yang setingkat	Konsultasi dan Koordinasi
3.	Pejabat-pejabat di pemerintah provinsi, pejabat di pemerintah pusat.	Pejabat yang lebih tinggi di unit kerja lain	koordinasi
4.	Pejabat dalam jabatan administrator di lingkup Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bawahan langsung	Menyelia, membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No	Aspek	Faktor
1.	Tempat kerja	Dalam ruangan tertutup
2.	Suhu	Dingin
3.	Udara	Sejuk
4.	Keadaan Ruangan	Normal
5.	Letak	Rata
6.	Penerangan	Terang
7.	Suara	Tidak Bising
8.	Keadaan tempat kerja	Normal
9.	Getaran	Tidak Ada

14. Resiko Bahaya :

No	Fisik / Mental	Penyebab
1.	Kejenuhan	Melakukan pekerjaan yang sama setiap hari
2.	Kelelahan fisik	Volume dan kompleksnya kegiatan
3.	Stress	Tekanan dan beban pekerjaan

15. Syarat Jabatan :

- a. Keterampilan kerja : Keterampilan dalam mengelola kegiatan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
- b. Bakat Kerja :
 - 1) G : Intelegensia
 - 2) V : Bakat Verbal
 - 3) Q : Ketelitian

c. Temperamen Kerja :

- 1) D (DCP) : kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk kegiatan memimpin (DIRECTION), mengendalikan (CONTROL), atau merencanakan (PLANING).
- 2) M (MVC) : kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan kesimpulan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan keputusan berdasarkan kriteria yang dapat diukur atau yang dapat diuji (MEASURABLE AND VARIABLE CRITERIA).
- 3) I (INFLU) : kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan mempengaruhi (INFLUENCING) orang lain dalam pendapat, sikap atau pertimbangan mengenai gagasan.

d. Minat Kerja :

- 1) Ia : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan benda-benda dan obyek-obyek.
- 2) 2a : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan orang.
- 3) Ib : melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunitas data.

e. Upaya Fisik :

- 1) Duduk
- 2) Berbicara
- 3) Melihat

f. Kondisi Fisik :

- 1) Jenis Kelamin : Laki-laki atau Perempuan
- 2) Umur : -
- 3) Tinggi badan : -
- 4) Berat badan : -
- 5) Postur badan : -
- 6) Penampilan : -

g. Fungsi Pekerja :

- 1) D1 : Mengkoordinasikan
- 2) O0 : Menasehati
- 3) O8 : Menerima Instruksi

16. Prestasi Kerja Yang Diharapkan : Terlaksananya semua tugas dan tanggung jawab dengan baik atau sangat baik di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

17. Kelas Jabatan : 14

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

1. Nama Jabatan : Operator Layanan Operasional
2. Kode Jabatan :
3. Unit Kerja : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. JPT Utama :
 - b. JPT Madya :
 - c. JPT Pratama :
 - a. Administrator : Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak
 - d. Pengawas :
 - e. Pelaksana : Operator Layanan Operasional
 - f. Jabatan Fungsional :
4. Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis mencakup kegiatan pelayanan dan pengelolaan di bidang kerumahtanggaan, dukungan pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas fungsi organisasi.
5. Kualifikasi Jabatan :
 - a. Pendidikan : SLTA Sederajat
 - b. Kursus/Diklat
 - 1) Penjenjangan : -
 - 2) Teknis : Tidak dipersyaratkan
 - c. Pengalaman kerja: Tidak dipersyaratkan
 - d. Pengetahuan kerja : pengetahuan sesuai dengan tugas operasional yang dikerjakan
6. Tugas Pokok :

Nama Jabatan : Operator Layanan Operasional

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN	WAKTU KERJA EFEKTIF	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mempelajari standar, pedoman dan prosedur kerja serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi yang dijalankan	Kegiatan	6.000	75.000	1	0,080	
2	Memeriksa keadaan fisik alat kerja yang digunakan	kegiatan	12.000	75.000	1	0,160	
3	Menjalankan kegiatan operasional layanan	Kegiatan	30.000	75.000	1	0,400	
4	Merawat dan menjaga kebersihan alat kerja operasional	kegiatan	12.000	75.000	1	0,160	
5	Menyampaikan informasi, usul dan saran yang berkaitan dengan tugas operasional yang dijalankan	kegiatan	9.000	75.000	1	0,120	
6	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan	Laporan	6.000	75.000	1	0,080	
JUMLAH						1,000	
PEMBULATAN						1	

7. Bahan Kerja :

No	Bahan Kerja	Penggunaan Dalam Tugas
1.	Disposisi atasan	Dasar untuk melaksanakan tugas
2.	Juknis peralatan kantor	Bahan Kerja

8. Peralatan Kerja:

No	Peralatan Kerja	Digunakan Untuk Tugas
1.	Peralatan Kantor, Mesin, Kendaraan	Pendukung pelaksanaan tugas
2.	SOP	Petunjuk pelaksanaan tugas

9. Hasil Kerja:

No	Hasil Kerja	Satuan Hasil
1.	rencana kerja	kegiatan
2.	program perbaikan	kegiatan
3.	program pemeliharaan	kegiatan
4.	Laporan	Dokumen

10. Tanggung Jawab:

- a. Kebenaran rencana kerja
- b. Kebenaran program perbaikan
- c. Kebenaran program pemeliharaan
- d. Kebenaran Laporan.

11. Wewenang:

- b. Meminta petunjuk atasan
- c. Melaporkan kegiatan kepada atasan

12. Hubungan Kerja:

1.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak	Atasan Langsung	Menerima tugas, petunjuk kerja dan melaporkan hasil kerja
2.	Jabatan Pelaksana Lingkup Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak	Jabatan yang setingkat	Koordinasi

13. Kondisi Lingkungan Kerja:

No	Aspek	Faktor
1.	Tempat kerja	Di dalam dan di luar ruangan
2.	Suhu	Cukup
3.	Udara	Sejuk
4.	Keadaan Ruangan	Normal
5.	Letak	Rata
6.	Penerangan	Terang
7.	Suara	Tidak Bising
8.	Keadaan tempat kerja	Normal
9.	Getaran	Tidak Ada

14. Resiko Bahaya:

No	Fisik / Mental	Penyebab
1.	Kejenuhan	Karena melakukan pekerjaan yang sama setiap hari
2	Cacat	Kecelakaan kerja

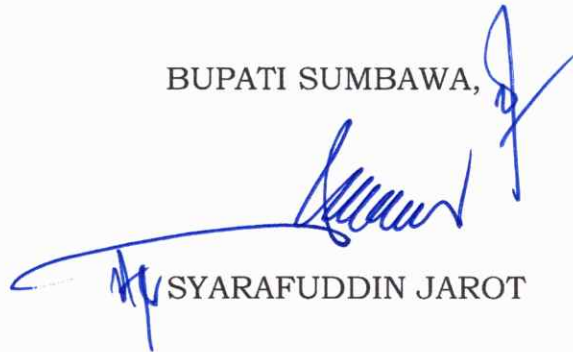
15. Syarat Jabatan:

- a. Keterampilan kerja : -
- b. Bakat Kerja :
 1. G : Intelegensia
 2. V : Bakat Verbal
 3. Q : Ketelitian
- c. Temperamen Kerja :
 - 1) R (REPCON) : kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang berulang-ulang (REPETITIVE), atau terus menerus (CONTINUOUSLY) melakukan kegiatan yang sama, sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan yang tertentu;
 - 2) V (VARCH) : kemampuan menyesuaikan diri dengan ketentuan untuk melaksanakan berbagai tugas (VARIETY), sering berganti (CHANGING) dari tugas yang satu ke tugas yang lainnya yang berbeda sifatnya tanpa kehilangan efisiensi atau ketenangan diri.
- d. Minat Kerja :
 - 1) Ia : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan benda-benda dan obyek-obyek;
 - 2) 2a : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan orang;
 - 3) Ib : melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunitas data
- e. Upaya Fisik :
 - 1) Duduk
 - 2) Berbicara
 - 3) Melihat
- f. Kondisi Fisik :
 - 1) Jenis Kelamin : Laki-laki atau Perempuan
 - 2) Umur : -
 - 3) Tinggi badan : -
 - 4) Berat badan : -
 - 5) Postur badan : -
 - 6) Penampilan : -
- g. Fungsi Pekerja :
 - 1) D3 : Menyusun
 - 2) O7 : Melayani
 - 3) O8 : Menerima instruksi
 - 4) B7 : Memegang

16. Prestasi Kerja Yang Diharapkan : Terlaksananya kegiatan layanan oprasional kantor dengan baik atau sangat baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan

17. Kelas Jabatan : 5

BUPATI SUMBAWA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a series of loops and a final vertical stroke.

SYARAFUDDIN JAROT

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 59 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 SUMBAWA NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG
 ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI
 LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
 KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA.

REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)

UNIT KERJA : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	HASIL ABK	KELEBIHAN/KEKURANGAN
		PNS		
1	2	3	5	6
1	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa	0	1	-1
2	Sekretaris	1	1	0
	- JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Madya	0	1	-1
	- JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	1	1	0
	- JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Pertama	0	1	-1
	- JF Perencana Madya	0	1	-1
	- JF Perencana Muda	1	1	0
	- JF Perencana Pertama	0	1	-1
	- Penelaah Teknis Kebijakan	0	2	-2
	- Pengolah Data dan Informasi dan Informasi	1	1	0
	- Pengadministrasi Perkantoran	1	2	-1
	a Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	0	1	-1
	- JF Arsiparis Penyelia	0	1	-1
	- JF Arsiparis Mahir	0	1	-1
	- JF Arsiparis Terampil	0	1	-1
	- JF Pranata Komputer Penyelia	0	1	-1
	- JF Pranata Komputer Mahir	0	1	-1
	- JF Pranata Komputer Terampil	0	1	-1
	- JF Pranata SDM Aparatur Penyelia	0	1	-1
	- JF Pranata SDM Aparatur Mahir	0	1	-1
	- JF Pranata SDM Aparatur Terampil	0	1	-1
	- Penelaah Teknis Kebijakan	1	2	-1
	- Pengolah Data dan informasi	0	2	-2
	- Pengadministrasi Perkantoran	3	6	-3
	- Penata Layanan Operasional	0	1	-1
	- Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
	- Operator Layanan Operasional	0	1	-1
3	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga	1	1	0
	- JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Madya	0	1	-1
	- JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda	1	2	-1
	- JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Pertama	0	1	-1
	- JF Asisten Apoteker Penyelia	0	1	-1
	- JF Asisten Apoteker Mahir	1	1	0

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	HASIL ABK	KELEBIHAN/KEKURANGAN
		PNS		
1	2	3	5	6
	- JF Asisten Apoteker Terampil	0	1	-1
	- Penelaah Teknis Kebijakan	0	2	-2
	- Pengolah Data dan Informasi	0	2	-2
	- Pengadministrasi Perkantoran	1	3	-2
	- Penata Layanan Operasional	0	2	-2
	- Operator Layanan Operasional	0	1	-1
4	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga	1	1	0
	- JF Analis Kebijakan Madya	0	1	-1
	- JF Analis Kebijakan Muda	3	3	0
	- JF Analis Kebijakan Pertama	1	1	0
	- Penelaah Teknis Kebijakan	0	2	-2
	- Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
	- Pengadministrasi Perkantoran	0	2	-2
5	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan Penggerakan	1	1	0
	- JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Madya	0	1	-1
	- JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda	3	3	0
	- JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Pertama	0	1	-1
	- Penelaah Teknis Kebijakan	1	2	-1
	- Pengolah Data dan Informasi	0	2	-2
	- Pengadministrasi Perkantoran	0	3	-3
	- Penata Layanan Operasional	0	1	-1
6	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	1	1	0
	- JF Analis Kebijakan Madya	0	1	-1
	- JF Analis Kebijakan Muda	3	3	0
	- JF Analis Kebijakan Pertama	1	1	0
	- JF Penggerak Swadaya Masyarakat Madya	0	1	-1
	- JF Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	0	2	-2
	- JF Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama	0	2	-2
	- Penelaah Teknis Kebijakan	1	2	-1
	- Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	2	-2
	- Pengolah Data dan Informasi	0	2	-2
	- Pengadministrasi Perkantoran	0	3	-3
7	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Lunyuk	0	1	-1
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	0	1	-1
	- Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
	- Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
	- Penata Layanan Operasional	0	1	-1
	- Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
	- Operator Layanan Operasional	0	1	-1
8	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Alas	0	1	-1
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	0	1	-1
	- Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
	- Pengolah Data dan Informasi	1	1	0
	- Penata Layanan Operasional	0	1	-1
	- Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
	- Operator Layanan Operasional	0	1	-1
9	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Utan	1	1	0

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	HASIL ABK	KELEBIHAN / KEKURANGAN
		PNS		
1	2	3	5	6
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	1	1	0
	- Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
	- Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
	- Penata Layanan Operasional	0	1	-1
	- Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
	- Operator Layanan Operasional	0	1	-1
10	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Batu Lanteh	1	1	0
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	0	1	-1
	- Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
	- Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
	- Penata Layanan Operasional	0	1	-1
	- Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
	- Operator Layanan Operasional	0	1	-1
11	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Sumbawa	1	1	0
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	1	1	0
	- Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
	- Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
	- Penata Layanan Operasional	0	1	-1
	- Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
	- Operator Layanan Operasional	0	1	-1
12	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Moyo Hilir	1	1	0
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	1	1	0
	- Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
	- Pengolah Data dan Informasi	1	1	0
	- Penata Layanan Operasional	0	1	-1
	- Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
	- Operator Layanan Operasional	0	1	-1
13	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Moyo Hulu	1	1	0
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	1	1	0
	- Pengadministrasi Perkantoran	1	1	0
	- Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
	- Penata Layanan Operasional	0	1	-1
	- Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
	- Operator Layanan Operasional	0	1	-1
14	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Ropang	1	1	0
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	0	1	-1
	- Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
	- Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
	- Penata Layanan Operasional	0	1	-1
	- Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
	- Operator Layanan Operasional	0	1	-1
15	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Lape	1	1	0
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	0	1	-1
	- Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
	- Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
	- Penata Layanan Operasional	0	1	-1
	- Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	HASIL ABK	KELEBIHAN / KEKURANGAN
		PNS		
1	2	3	5	6
	- Operator Layanan Operasional	0	1	-1
16	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Plampang	1	1	0
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	1	1	0
	- Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
	- Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
	- Penata Layanan Operasional	0	1	-1
	- Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
	- Operator Layanan Operasional	0	1	-1
17	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Empang	1	1	0
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	1	1	0
	- Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
	- Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
	- Penata Layanan Operasional	0	1	-1
	- Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
	- Operator Layanan Operasional	0	1	-1
18	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Alas Barat	1	1	0
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	0	1	-1
	- Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
	- Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
	- Penata Layanan Operasional	0	1	-1
	- Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
	- Operator Layanan Operasional	0	1	-1
19	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Labuhan Badas	1	1	0
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	1	1	0
	- Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
	- Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
	- Penata Layanan Operasional	0	1	-1
	- Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
	- Operator Layanan Operasional	0	1	-1
20	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Labangka	1	1	0
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	0	1	-1
	- Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
	- Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
	- Penata Layanan Operasional	0	1	-1
	- Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
	- Operator Layanan Operasional	0	1	-1
21	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Buer	1	1	0
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	0	1	-1
	- Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
	- Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
	- Penata Layanan Operasional	0	1	-1
	- Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
	- Operator Layanan Operasional	0	1	-1
22	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Rhee	1	1	0
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	0	1	-1
	- Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
	- Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	HASIL ABK	KELEBIHAN / KEKURANGAN
		PNS		
1	2	3	5	6
	- Penata Layanan Operasional	0	1	-1
	- Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
	- Operator Layanan Operasional	0	1	-1
23	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Unter Iwes	1	1	0
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	0	1	-1
	- Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
	- Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
	- Penata Layanan Operasional	0	1	-1
	- Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
	- Operator Layanan Operasional	0	1	-1
24	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Moyo Utara	1	1	0
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	1	1	0
	- Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
	- Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
	- Penata Layanan Operasional	0	1	-1
	- Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
	- Operator Layanan Operasional	0	1	-1
25	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Maronge	0	1	-1
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	0	1	-1
	- Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
	- Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
	- Penata Layanan Operasional	0	1	-1
	- Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
	- Operator Layanan Operasional	0	1	-1
26	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Tarano	0	1	-1
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	0	1	-1
	- Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
	- Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
	- Penata Layanan Operasional	0	1	-1
	- Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
	- Operator Layanan Operasional	0	1	-1
27	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Orong Telu	1	1	0
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	0	1	-1
	- Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
	- Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
	- Penata Layanan Operasional	0	1	-1
	- Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
	- Operator Layanan Operasional	0	1	-1
28	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Lopok	1	1	0
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	1	1	0
	- Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
	- Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
	- Penata Layanan Operasional	0	1	-1
	- Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
	- Operator Layanan Operasional	0	1	-1
29	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Lantung	1	1	0
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	0	1	-1

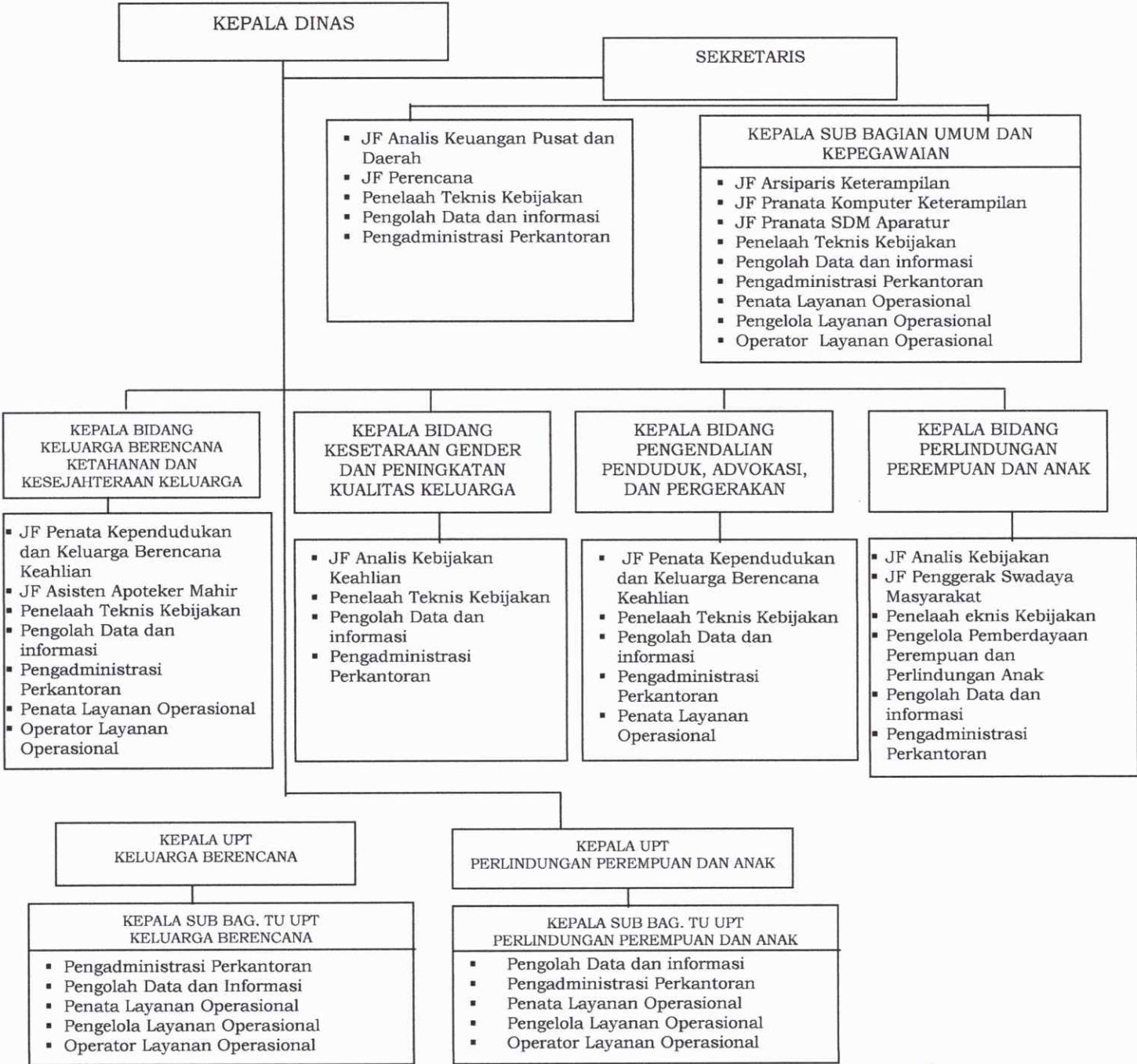
NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	HASIL ABK	KELEBIHAN / KEKURANGAN
		PNS		
1	2	3	5	6
	- Pengadministrasi Perkantoran	1	1	0
	- Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
	- Penata Layanan Operasional	0	1	-1
	- Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
	- Operator Layanan Operasional	0	1	-1
30	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Lenangguar	1	1	0
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	0	1	-1
	- Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
	- Pengolah Data dan Informasi	1	1	0
	- Penata Layanan Operasional	0	1	-1
	- Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
	- Operator Layanan Operasional	0	1	-1
31	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	1	1	0
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	0	1	-1
	- Pengadministrasi Perkantoran	0	2	-2
	- Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
	- Penata Layanan Operasional	0	1	-1
	- Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
	- Operator Layanan Operasional	0	1	-1
	TOTAL	64	275	-211

BUPATI SUMBAWA

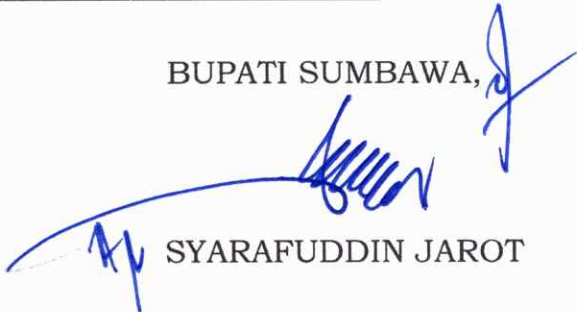
SYARAFUDDIN JAROT

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 59 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG ANALISIS
JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI
LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMBAWA.

**PETA JABATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA**



BUPATI SUMBAWA,


SYARAFUDDIN JAROT